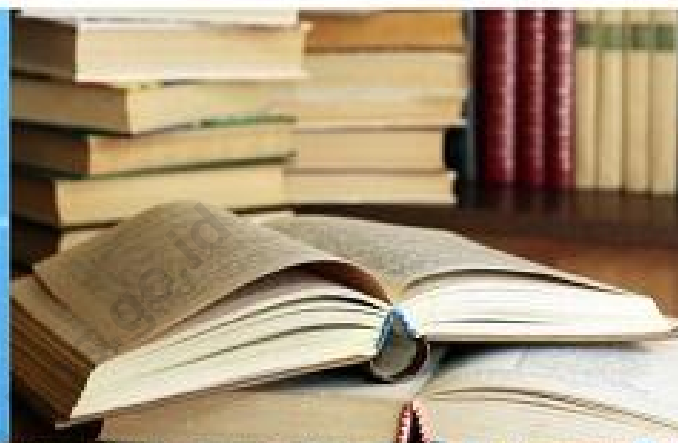


# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MUKOMUKO 2014





**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN MUKOMUKO  
2015**

<http://mukomukoko.go.id>

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MUKOMUKO 2015**

Nomor ISBN : 978-602-6869-11-1  
Nomor Publikasi : 1706.1502  
Katalog BPS : 4102002.1706  
Ukuran Buku : 25,0 cm x 17,6 cm  
Jumlah Halaman : viii + 56 halaman

Naskah:

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Mukomuko**

Gambar kulit:

**Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Mukomuko**

Diterbitkan oleh:

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko**

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

## Kata Pengantar



Pada tahun 2015 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko kembali menerbitkan publikasi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko Tahun 2015**. Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data terhadap informasi di bidang pembangunan manusia wilayah Kabupaten Mukomuko.

Data yang disajikan dalam publikasi ini menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mukomuko tahun 2014 berikut perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Publikasi ini menyajikan tabel dan pembahasan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga para pengguna data baik sebagai perencana, peneliti, serta penentu kebijakan dapat menggunakan dan menganalisis data IPM Kabupaten Mukomuko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga proses penyusunan publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyajian publikasi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pengguna data akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Mukomuko, Oktober 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Mukomuko,

**Amperianto, S.ST**



## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan dan Kegunaan .....	4
1.3 Jenis dan Sumber Data.....	5
1.4 Ruang Lingkup .....	6
1.5 Sistematika Penyajian.....	6
BAB II METODOLOGI	
2.1 Indikator.....	13
2.2 Metode Analisis.....	14
2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	17
2.4 Mengukur Kecepatan IPM .....	19
2.5 Klasifikasi Pembangunan Manusia .....	20
2.6 Konsep dan Definisi .....	20
BAB III HASIL-HASIL IPM	
3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia .....	25
3.2 Angka Harapan Hidup.....	26
3.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .....	26
3.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan .....	28
BAB IV PERBANDINGAN IPM KABUPATEN MUKOMUKO DENGAN KABUPATEN LAIN	
4.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	35
4.2 Angka Harapan Hidup.....	37
4.3 Harapan Lama Sekolah .....	39
4.4 Rata-rata Lama Sekolah .....	40
4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan .....	41
BAB IV PERBANDINGAN IPM KABUPATEN MUKOMUKO DENGAN KABUPATEN LAIN	
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran .....	45
LAMPIRAN .....	49

## Daftar Tabel

No.	Nama	Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru IPM di Indonesia	12
Tabel 2.2	Share Kelompok Komoditas Pada Angka IPM	17
Tabel 2.3	Perbandingan Rumus Penghitungan Indeks Pembanguna Manusia	18
Tabel 2.4	Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM	19
Tabel 2.5	Klasifikasi dan Capaian IPM	20
Tabel 4.1	Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2011-2014	37



## Daftar Gambar

No.	Nama	Halaman
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko, 2010-2014	25
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014	26
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014	27
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014	28
Gambar 3.5	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014	28
Gambar 3.6	Tingkat kesenjangan antar komponen IPM di Kabupaten Mukomuko, 2014	29
Gambar 3.7	Penduduk usia 15+ menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Mukomuko, 2014	30
Gambar 3.8	Perbandingan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Mukomuko terhadap Target MDGs 2015, 2014	31
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	35
Gambar 4.2	Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2014	36
Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014	38
Gambar 4.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014	39
Gambar 4.5	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014	40
Gambar 4.6	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014	41

## Daftar Lampiran

No.	Nama	Halaman
Tabel 1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	49
Tabel 2	Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	50
Tabel 3	Pertumbuhan IPM (Persen) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	51
Tabel 4	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	52
Tabel 5	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	53
Tabel 6	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	54
Tabel 7	Pendapatan per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014	55

# PENDAHULUAN

1

<http://mukomukop.bps.go.id>



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Dewasa ini, perkembangan era globalisasi menuntut setiap insan untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing ketat dalam menghadapi arus pasar bebas. Oleh karenanya diperlukan pembangunan yang menitikberatkan pada kualitas manusia sebagai sumber daya yang tak lain merupakan objek dari pembangunan tersebut. Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pada tahun 1990, *United Nation Development Programme* (UNDP) telah merangkum satu indeks tunggal yang mampu mengukur ketiga dimensi tersebut yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pembangunan manusia dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks tersebut merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia yang telah distandarkan secara internasional dan khusus untuk Indonesia telah disajikan sampai level kabupaten mulai tahun 2001.

Mengingat arti penting pembangunan manusia, Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu kabupaten yang relatif berusia muda (terbentuk tahun 2003) senantiasa memperhatikan perkembangan pembangunan manusia di daerah ini, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai indikator pembangunan, IPM mempunyai arti dan fungsi yang sangat luas, diantaranya:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3

dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

- 2) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- 3) Dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan pemerintah.
- 4) IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusianya.
- 5) Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
- 6) IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- 7) IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penghitungan IPM meliputi tiga aspek kehidupan yang berfokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai subjek pembangunan nasional. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Fisik**

Dari aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kesehatan penduduk yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir.

### **2. Mental**

Dari aspek mental bertujuan untuk mengetahui pendidikan penduduk yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

### **3. Kesejahteraan Ekonomi**

Dari aspek kesejahteraan ekonomi bertujuan untuk mengetahui daya beli penduduk yang diukur dengan pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Sebagai sebuah indikator, penghitungan IPM bertujuan pula untuk alat evaluasi sekaligus dasar perencanaan pembangunan. Di era otonomi daerah, perencanaan pembangunan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah, termasuk diantaranya adalah peningkatan pembangunan manusia. Melalui analisis IPM Kabupaten Mukomuko ini, diharapkan dapat digunakan untuk:

- (a) Sebagai indikator awal untuk memahami bahwa pembangunan manusia mempunyai cakupan yang luas. Apa yang diungkapkan oleh IPM sesungguhnya memiliki kaitan implisit dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, gizi anak, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM bukan hanya berfokus pada tiga aspek semata, tetapi harus melalui perencanaan yang komprehensif.
- (b) Angka IPM melalui tiga komponennya memberikan indikasi tingkat ketertinggalan atas pembangunan manusia, apakah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonominya. Berdasarkan hal itu dapat digunakan untuk menyusun prioritas dan penciptaan kondisi yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
- (c) Melalui besaran IPM, dapat disusun penggolongan daerah menurut kualitas pembangunan manusianya. Dengan demikian, dapat digunakan untuk memetakan posisi suatu daerah dibanding daerah lain.

### **1.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia antara lain data Susenas, Survei Kependudukan, dan Sensus Penduduk (SP2010). Untuk data SP2010, hasil proyeksinya digunakan untuk menghitung indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Untuk menghitung Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan data Susenas. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi

dengan data siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pembangunan manusia, maka analisis mengenai IPM Kabupaten Mukomuko ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Analisis IPM dimulai dari tahun 2010 hingga 2014 dengan memperbandingkan perkembangan setiap tahunnya.
- (2) Fokus analisis adalah pada empat indikator IPM, yaitu Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.
- (3) Untuk melihat posisi pembangunan manusia di Kabupaten Mukomuko dilakukan perbandingan dengan IPM Provinsi Bengkulu dan kabupaten lain dalam Provinsi Bengkulu.

#### **1.5 Sistematika Penyajian**

Penyajian buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2013 ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, menyajikan :
  - 1.1 Latar belakang
  - 1.2 Tujuan dan kegunaan
  - 1.3 Jenis dan sumber data
  - 1.4 Ruang lingkup
  - 1.5 Sistematika penyajian



- Bab 2. Metodologi, menyajikan :
  - 2.1 Indikator
  - 2.2 Metode analisis
  - 2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia
  - 2.4 Mengukur kecepatan IPM
  - 2.5 Klasifikasi pembangunan manusia
  - 2.6 Konsep dan definisi
  
- Bab 3. Hasil-hasil IPM, menyajikan:
  - 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
  - 3.2 Angka Harapan Hidup
  - 3.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
  - 3.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
  
- Bab 4. Perbandingan IPM Kabupaten Mukomuko dengan kabupaten lain, menyajikan:
  - 4.1 Indeks Pembangunan Manusia
  - 4.2 Angka Harapan Hidup
  - 4.3 Harapan Lama Sekolah
  - 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah
  - 4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
  
- Bab 5. Kesimpulan dan saran, menyajikan:
  - 5.1 Kesimpulan
  - 5.2 Saran



# METODOLOGI

2

<http://mukomukocah.bps.go.id>



## 2. METODOLOGI

Pembangunan manusia menurut definisi UNDP (1990) merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk (*a process of enlarging people's choice*). Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Upaya terhadap peningkatan kemampuan dasar manusia berarti juga pemenuhan akan hak asasi, yaitu hak untuk menikmati usia yang lebih panjang dan sehat, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk dapat hidup layak.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah digunakan suatu indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Walaupun indikator tersebut tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tapi mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Dinamakan indeks komposit karena dibentuk dari tiga komponen tersebut: Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran.

Pada tahun 2014, mulai diperkenalkan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Metode baru ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya. Metode baru ini telah menghitung angka IPM tahun 2010-2014 untuk seluruh provinsi di Indonesia hingga ke level kabupaten/kota. Terdapat beberapa perbedaan antara IPM metode lama dan IPM metode baru, antara lain:

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Lama dan Metode Baru IPM di Indonesia

No.	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
1.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	Angka Harapan Hidup saat Lahir
2.	Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15+	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+
3.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
4.	Rata-rata Hitung/Aritmatik	Rata-rata Ukur/Geometrik
5.	Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik
6.	Produk Domestik Bruto	Produk Nasional Bruto

Sumber: BPS RI, 2015

Perubahan metode lama ke metode baru ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah semakin menurunnya *share* dari komoditas terpilih di metode lama (27 komoditas PPP) dari 37,52 persen di tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Kondisi ini akan membuat IPM yang dihitung menjadi tidak relevan dan akurat lagi. Oleh karena itu, pada metode baru penghitungan IPM ditambahkan beberapa komoditas agar mewakili kondisi yang sebenarnya dengan baik, relevan, dan akurat.

Keunggulan dari metode baru penghitungan IPM ini adalah lebih mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya dan lebih menangkap kesenjangan antar dimensi. Perubahan metode penghitungan IPM ini memiliki beberapa dampak pada level dan peringkat IPM. Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Dengan metode baru, terjadi perubahan peringkat IPM di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, peringkat IPM metode baru tidak bisa diperbandingkan dengan peringkat IPM metode lama sebagai akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

## 2.1 Indikator

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan lain:

1. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut.
2. Objektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.
3. Sensitif, perubahan yang kecil mampu terdeteksi oleh indikator.
4. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari tiga jenis indikator, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dari anak usia satu tahun ( $AHHe_1$ ).

Menurut jenisnya indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Indikator input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio

murid-kelas, rasio penduduk-dokter, rasio penduduk-puskesmas, dan lain sebagainya.

2. Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Jumlah Jam Kerja, Rata-rata Jumlah Kunjungan ke Puskesmas, Persentase Proses Kelahiran yang Ditolong oleh Dukun, dan sebagainya.
3. Indikator output/outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (*output*) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti persentase penduduk dengan pendidikan SMA/setara ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), dan lain-lain.

## 2.2 Metode Analisis

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (AHH- $e_0$ ), Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan Indeks Pengeluaran (Pengeluaran per Kapita Disesuaikan). Penjelasan mengenai indeks-indeks tersebut sebagai berikut:

### a. Komponen Umur Panjang (*Longevity*)

Umur panjang (*longevity*) diukur dengan indeks kesehatan. Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup. Namun, dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat di suatu wilayah. Sumber data yang dapat digunakan untuk penghitungan Angka Harapan Hidup ini adalah dari hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010. Setelah diperoleh Angka Harapan Hidup saat lahir, selanjutnya dihitung indeksnya dengan membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimum untuk angka harapan hidup, yaitu masing-masing 20 tahun dan 85 tahun).



b. Komponen Pengetahuan (*Knowledge*)

Sementara itu komponen pengetahuan diukur menggunakan dua variabel, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling-MYS*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sumber data yang dapat digunakan untuk penghitungan HLS dan RLS ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren ini diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Sesuai dengan standar UNDP, maka ditetapkan angka minimum dan maksimum HLS masing-masing sebesar 0 tahun dan 18 tahun.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sama halnya dengan HLS, angka minimum dan maksimum RLS juga mengikuti standar UNDP, yaitu masing-masing sebesar 0 tahun dan 15 tahun.

c. Komponen Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Untuk itu penghitungan IPM menggunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk, penggunaannya sendiri sudah merupakan kesepakatan dari UNDP untuk keperluan

perbandingan antar wilayah/negara. Sumber data yang digunakan adalah jumlah pengeluaran per kapita yang meliputi konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan dari Susenas Modul.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan (share 39,8 persen) dan sisanya merupakan komoditas non-makanan (share 36,9 persen). Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Sedangkan pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan.

Kecuali untuk paritas daya beli (PPP), BPS tidak berpedoman pada standar UNDP, tapi BPS memiliki ukuran standar angka minimum dan maksimum sendiri, yaitu Rp 1.007.436 dan Rp 26.572.352. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Paritas Daya Beli (PPP) sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad \dots(1)^1$$

Keterangan:

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$

$p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Kabupaten Mukomuko

$m$  : jumlah komoditas

---

<sup>1</sup> Sumber: *Measuring The Real Size of The World Economy, The World Bank*

Tabel 2.2 Share Kelompok Komoditas Pada Angka IPM

Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>MAKANAN</b>	<b>47,29</b>	<b>39,82</b>	<b>66</b>
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
<b>NON-MAKANAN</b>	<b>52,71</b>	<b>33,81</b>	<b>30</b>
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>73,63</b>	<b>96</b>

Sumber: BPS RI, 2015

### 2.3 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Perubahan metode penghitungan IPM yang lama ke metode baru seperti yang disebutkan di Tabel 2.1 menyebabkan perubahan pula pada rumus penghitungan indeksinya. Dari ketiga indeks IPM, hanya penghitungan indeks

kesehatan yang masih sama dengan metode lama. Selibhnya untuk indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran menggunakan metode baru.

Table 2.3 Perbandingan Rumus Penghitungan Indeks Pembanguna Manusia

Metode	Rumus Penghitungan Indeks
(1)	(2)
Metode Lama	❖ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
	❖ $I_{pengetahuan} = \frac{2}{3}I_{AMH} + \frac{1}{3}I_{RLS}$ ❖ $I_{AMH} = \frac{AMH - AMH_{min}}{AMH_{maks} - AMH_{min}}$ ❖ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$
	❖ $I_{pengeluaran} = \frac{pengeluaran - pengeluaran_{min}}{pengeluaran_{maks} - pengeluaran_{min}}$
Metode Baru	❖ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
	❖ $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ ❖ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ ❖ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$
	❖ $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$

Sumber: BPS RI, 2015

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Adapun rumus penghitungan IPM sebagai berikut:

- Metode Lama

$$IPM = \frac{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}}{3} \quad \dots (2)$$

- Metode Baru

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad \dots (3)$$

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	85	20	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	15	0	Standar UNDP
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	26.572.352** (Rp)	1.007.436* (Rp)	Standar BPS menggunakan PNB riil per kapita yang telah disesuaikan

Sumber: BPS RI, 2015

**Catatan:**

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

**2.4 Mengukur Kecepatan IPM**

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan

perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100 \quad \dots (4)$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{t-1}$  : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

## 2.5 Klasifikasi Pembangunan Manusia

Meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan besaran/skor IPM yang dapat dicapai. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel 2.5 Klasifikasi dan Capaian IPM

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
< 60	Rendah
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$\geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber: BPS RI, 2015

## 2.6 Konsep dan Definisi

### Angka Harapan Hidup Saat Lahir ( $e_0$ )

Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

### Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling = EYS*)

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

### Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Scholing = MYS*)

Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

### Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah provinsi dan antar kabupaten/kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi/kabupaten/kota memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita dihitung dengan Metode Rao.

### Indeks Kesehatan

Perbandingan antara selisih Angka Harapan Hidup dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dan minimum Angka Harapan Hidup tersebut.

### Indeks Pengetahuan

Penjumlahan antara indeks Harapan Lama Sekolah dengan indeks Rata-rata Lama Sekolah dibagi dua.

### Konsumsi per Kapita

Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

### Indeks Pengeluaran

Perbandingan antara selisih logaritma pengeluaran dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dan minimum logaritma pengeluaran tersebut.

### Pertumbuhan Geometrik

Laju pertumbuhan IPM geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan IPM sama setiap tahunnya.

<http://mukomukokab.bps.go.id>



# HASIL-HASIL IPM

3

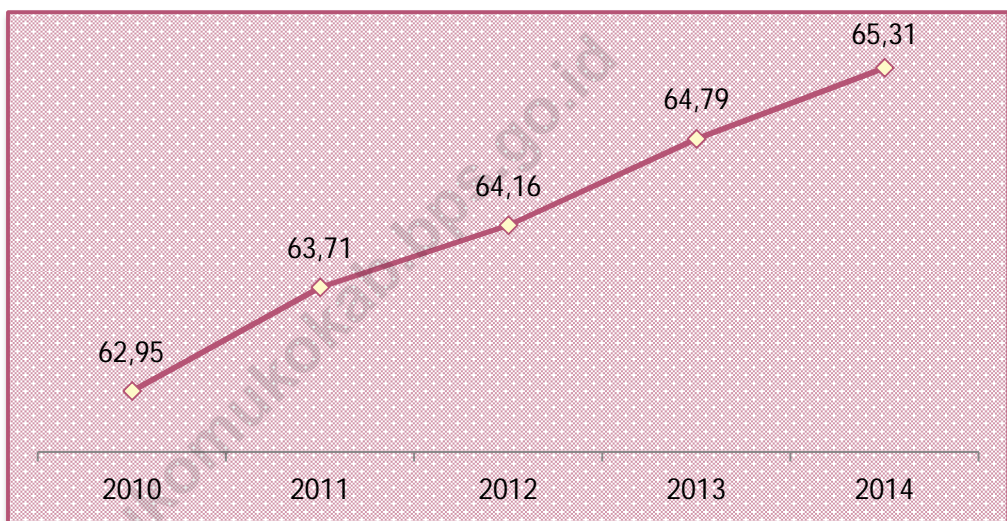
<http://mukomukorah.bps.go.id>



### 3. HASIL-HASIL IPM

#### 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Selama lima tahun terakhir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Mukomuko menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan IPM di kabupaten ini. Bila pada tahun 2010 IPM Kabupaten Mukomuko tercatat sebesar 62,95, maka pada tahun 2011 meningkat menjadi 63,71. Pada tahun 2012 IPM kembali meningkat menjadi 64,16, tahun 2013 menjadi 64,79, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 65,31.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko, 2010-2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dikarenakan IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari gabungan beberapa indikator, maka untuk mengetahui keberhasilan pembangunan sebaiknya ditelaah perkembangan tiap indikator tersebut.

### 3.2 Angka Harapan Hidup (AHH-e<sub>0</sub>)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. AHH Kabupaten Mukomuko mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Gambar di bawah menunjukkan perkembangan AHH selama 5 tahun terakhir dari 65,57 pada 2010 dan berturut-turut meningkat menjadi 65,66 (2011), 65,74 (2012), 65,80 (2013), dan pada tahun 2014 mencapai 65,83.



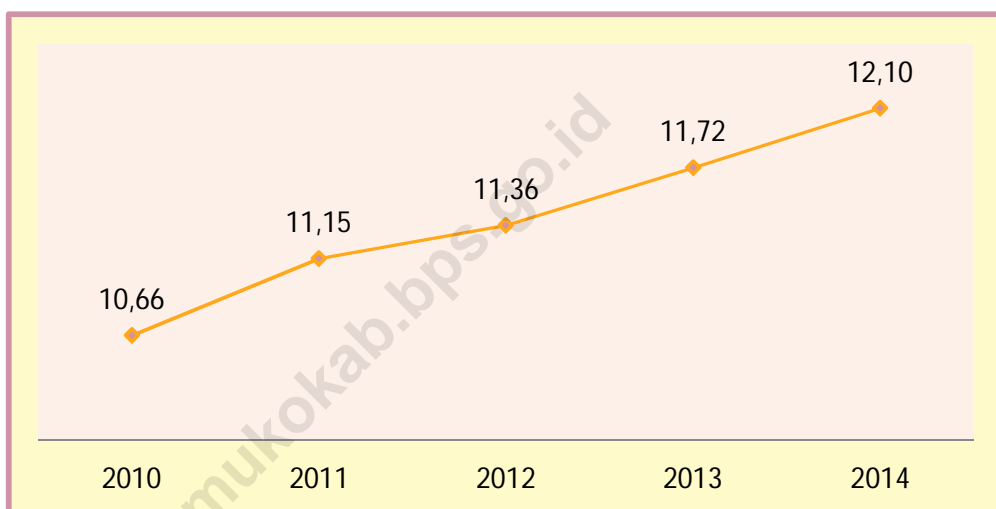
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014

### 3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS-EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS-MYS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan komponen indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM. HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara RLS

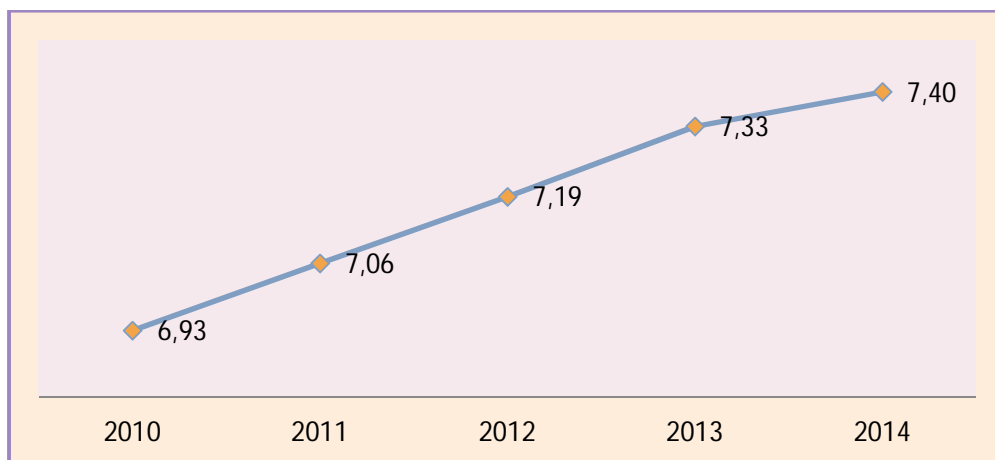
menggambarkan rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Oleh karenanya, peningkatan di bidang pendidikan, salah satunya ditandai dengan semakin bertambahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. HLS di Kabupaten Mukomuko meningkat dari 10,66 pada tahun 2010 menjadi 11,15 pada tahun 2011. Lalu meningkat menjadi 11,36 pada tahun 2012. HLS tersebut meningkat lagi menjadi 11,72 (2013) dan 12,10 (2014).



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014

Komponen rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Rata-rata lama sekolah berkisar pada angka 6,93 hingga 7,4 tahun yang berarti bahwa rata-rata lama sekolah yang ditempuh penduduk Mukomuko adalah setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

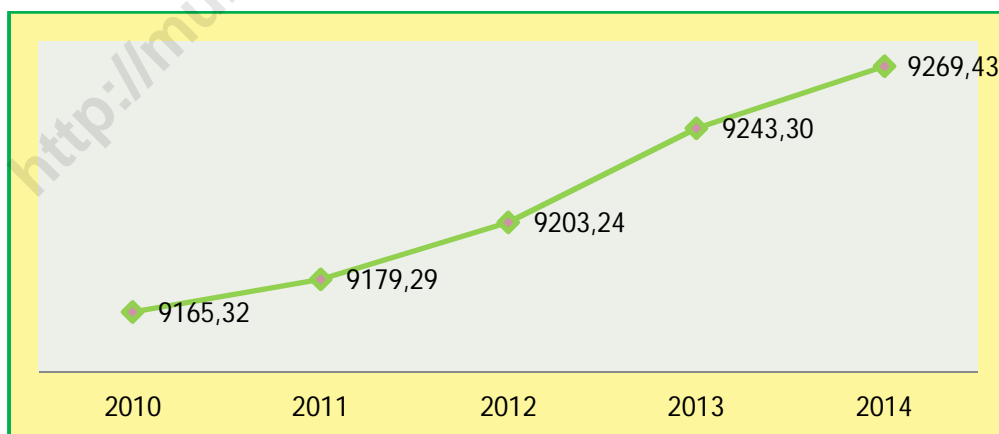


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014

### 3.4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

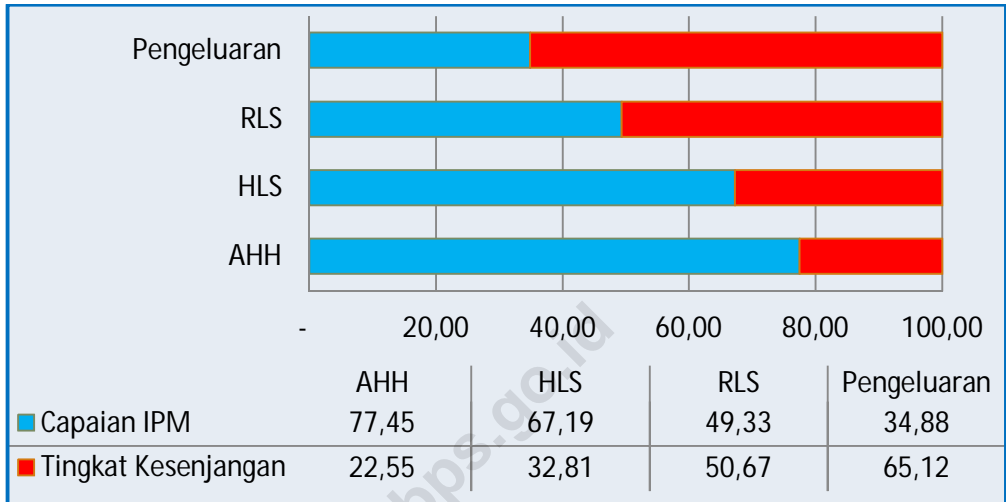
Perbaikan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan Paritas Power Parity/Paritas Daya Beli, mengalami peningkatan dari 9.165 ribu rupiah pada tahun 2010, berturut-turut meningkat menjadi 9.179 ribu rupiah (2011), 9.203 ribu rupiah (2012), 9.243 ribu rupiah (2013), dan pada tahun 2014 menjadi 9.269 ribu rupiah.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Mukomuko, 2010-2014

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UNDP, klasifikasi dan tingkat pencapaian IPM Kabupaten Mukomuko berada dalam kategori sedang (lihat Tabel 2.5).



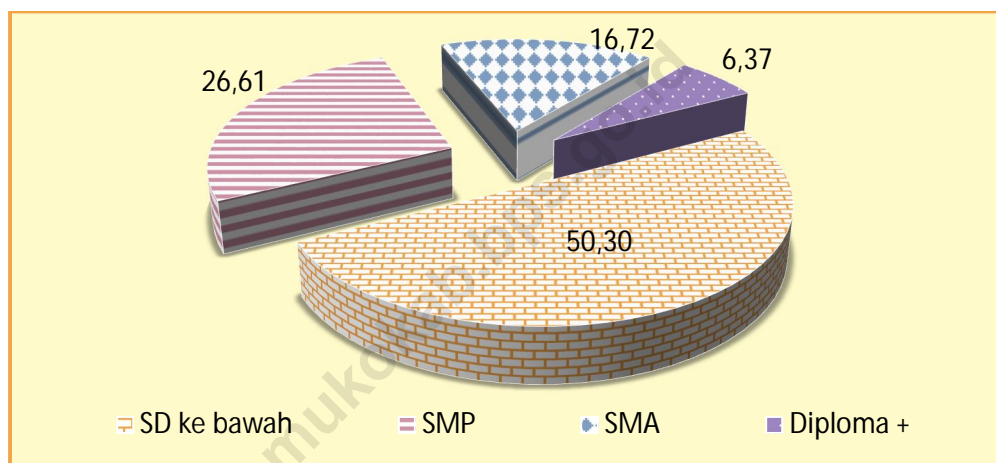
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 3.6 Tingkat kesenjangan antar komponen IPM di Kabupaten Mukomuko, 2014

Dengan menggunakan klasifikasi dan capaian IPM pada table 2.5, gambar di atas menunjukkan bahwa dari empat komponen yang menjadi penyusun IPM, komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan memiliki kesenjangan yang paling lebar, yaitu baru mencapai 34,88 persen sehingga masih mengalami kesenjangan sebesar 65,12 persen lagi. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang ditargetkan adalah maksimum Rp 26.572.352, sementara Kabupaten Mukomuko baru mencapai Rp 9.269 ribu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung lebih lambat dibandingkan pembangunan manusia. Kebijakan pemerintah Kabupaten Mukomuko yang mengedepankan sektor perkebunan sebagai basis ekonomi rakyat, yang diikuti dengan fluktuatifnya harga komoditas, diduga masih belum berperan dalam secara maksimal dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, Rata-rata Lama Sekolah juga memiliki kesenjangan yang lebar. RLS Kabupaten Mukomuko baru mencapai 49,33 persen dan kesenjangan sebesar 50,67 persen. Angka maksimum RLS menurut standar UNDP adalah 15 tahun, sedangkan RLS yang dicapai oleh Kabupaten Mukomuko adalah 7,40. Rendahnya RLS ini juga seiring dengan kondisi obyektif di mana 50,30 persen penduduk berusia 15+ di Kabupaten Mukomuko hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

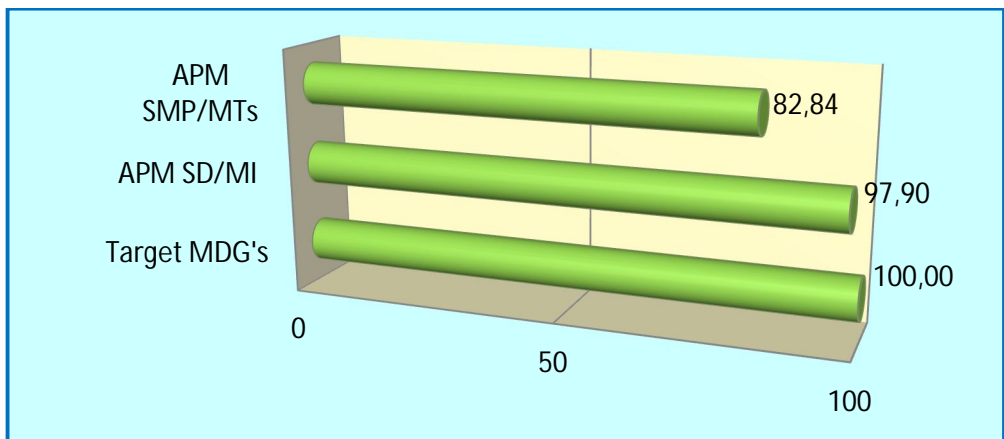


Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko, 2015

Gambar 3.7 Penduduk usia 15+ menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Mukomuko, 2014

Korelasi lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang masing-masing sebesar 97,9 dan 82,84, ternyata belum memenuhi batas target MDGs tahun 2015 sebesar 100 persen





Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko, 2015

Gambar 3.8 Perbandingan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Mukomuko terhadap Target MDGs 2015, 2014

Pada dasarnya, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi angka partisipasi menunjukkan semakin banyak anak yang menikmati pendidikan. Hal ini menggambarkan semakin banyak keluarga yang mampu dan sadar menyekolahkan anaknya. Tinggi rendahnya partisipasi sekolah secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ketersediaan tenaga pengajar, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak, keinginan anak untuk belajar, dan faktor budaya setempat. Sedangkan pengaruh tidak langsung anatara lain faktor ekonomi, tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua, kegiatan anak mencari uang sebelum waktunya serta pengaruh lingkungan fisik.

Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki kesenjangan yang cukup besar, yaitu 22,55 persen. Masih lebarnya kesenjangan AHH menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Mukomuko relatif masih rendah. Situasi ini juga seiring dengan kondisi objektif pembangunan kesehatan di Kabupaten Mukomuko, dimana masih dijumpai adanya penolong kelahiran yang bukan tenaga medis sekitar 7,99 persen, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada bayi yang kasusnya lebih tinggi dari tahun 2013 lalu, sanitasi perumahan yang

kurang memadai, serta masih kurangnya fasilitas kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan khususnya di daerah perdesaan.

Dari pencapaian seluruh komponen tersebut, secara agregat tercermin dalam pencapaian IPM Kabupaten Mukomuko sebesar 65,31. Berdasarkan besarnya kesenjangan antar komponen, dapat diperoleh gambaran komponen mana yang paling mendesak untuk segera diturunkan kesenjangannya serta strategi yang perlu dirumuskan untuk menurunkan kesenjangan tersebut.

**PERBANDINGAN IPM  
KABUPATEN  
MUKOMUKO DENGAN  
KABUPATEN LAIN**

**4**

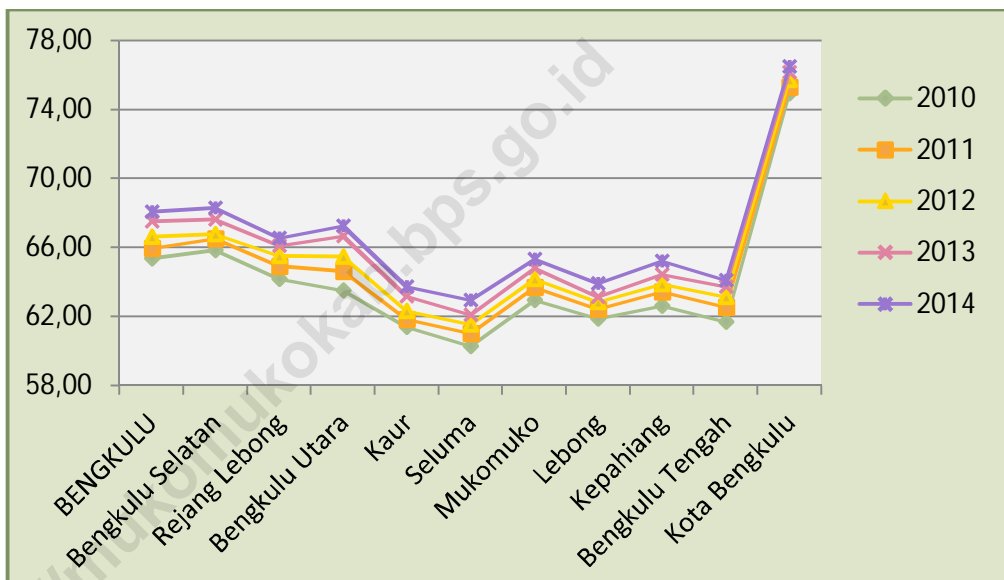
<http://mukomuko.bps.go.id>



#### 4. PERBANDINGAN IPM KABUPATEN MUKOMUKO DENGAN KABUPATEN LAIN

##### 4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IPM, memberi indikasi semakin tingginya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Secara umum, pencapaian IPM Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 68,06, tapi pada tingkat kabupaten/kota angkanya bervariasi.

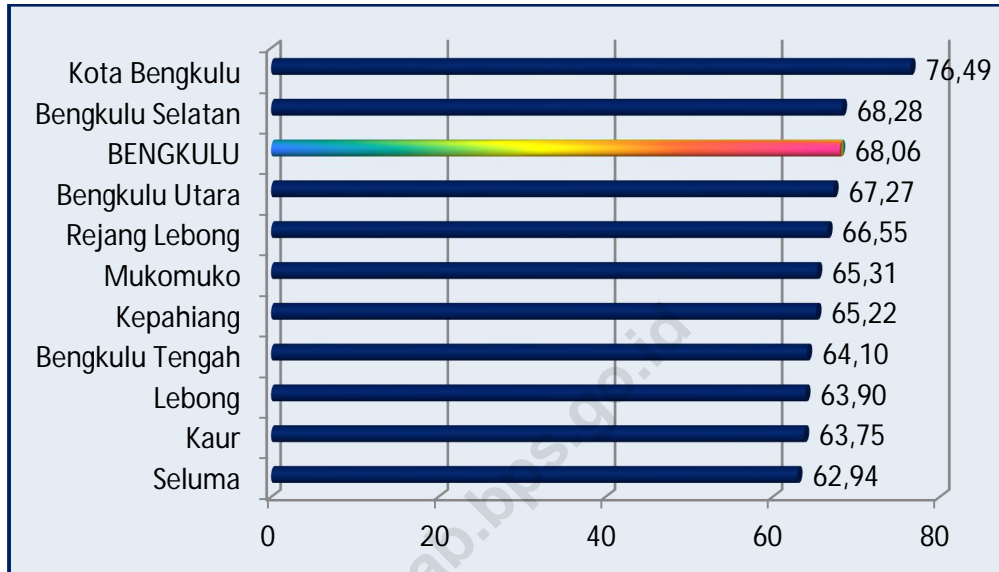


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014

Pada tahun 2014, IPM tertinggi terjadi di Kota Bengkulu mencapai 76,49, sedangkan IPM terendah ada di Kabupaten Seluma sebesar 62,94. Sementara Kabupaten Mukomuko mencapai IPM sebesar 65,31 menempati peringkat kelima setelah Kota Bengkulu (76,49), Bengkulu Selatan (68,28), Bengkulu Utara (67,27), dan Rejang Lebong (66,55). Dengan pencapaian ini, posisi masing-masing kabupaten/kota relatif tidak berubah antara tahun 2013 dengan tahun 2014.

Meskipun memiliki posisi yang relatif sama dengan tahun 2013 lalu, akselerasi pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota memiliki tingkat yang berbeda-beda.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.2 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2014

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Dengan menggunakan rumus pertumbuhan geometrik, Kabupaten Seluma, Kepahiang, dan Lebong tercatat memiliki pertumbuhan IPM yang paling tinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Mukomuko juga terlihat mengalami perlambatan di tahun 2014. Pada tahun 2013 pertumbuhan IPM Kabupaten Mukomuko tercatat 0,98 sementara pada tahun 2014 menjadi 0,8.

Tabel 4.1 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2011-2014

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bengkulu Selatan	0,93	0,99	1,34	0,82
Rejang Lebong	1,01	0,40	1,25	0,99
Bengkulu Utara	1,13	0,91	0,91	0,67
Kaur	1,74	1,34	1,83	0,89
Seluma	0,75	0,75	1,37	0,91
<b>Mukomuko</b>	<b>1,23</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>1,35</b>
Lebong	1,21	0,71	0,98	0,80
Kepahiang	0,91	0,66	0,49	1,19
Bengkulu Tengah	1,33	0,67	0,90	1,22
Kota Bengkulu	1,36	0,93	0,94	0,61
<b>BENKULU</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,60</b>	<b>0,43</b>

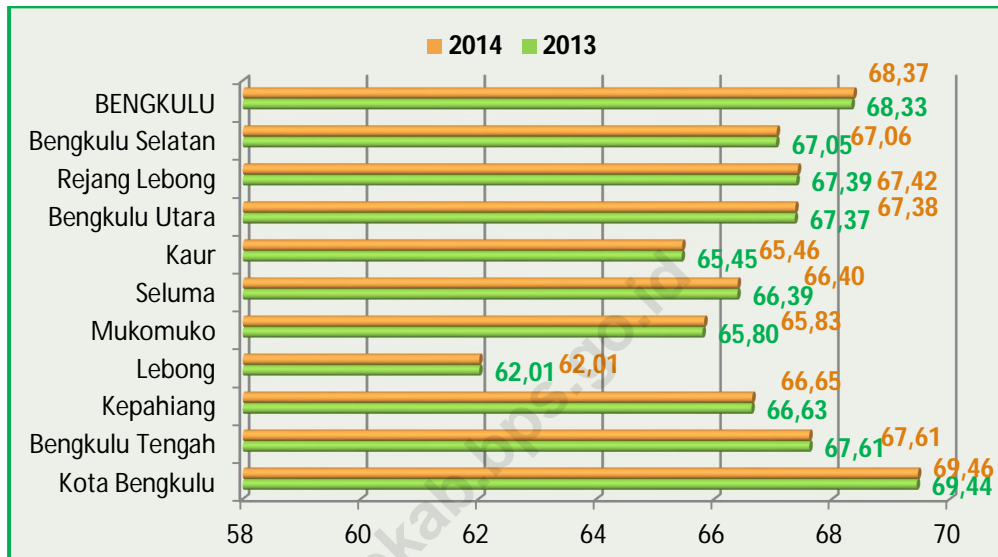
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Percepatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM, ditentukan oleh komponen yang mendasarinya yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

## 4.2 Angka Harapan Hidup

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar setiap lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat. Untuk itu, pemerintah telah membangun berbagai sarana dan prasarana kesehatan, seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan sebagainya. Di samping itu juga dibangun infrastruktur pendukung kesehatan

masyarakat seperti sarana air bersih, MCK, rumah sehat, dan sebagainya. Sedangkan untuk melayani kesehatan masyarakat, pemerintah juga telah menyediakan dokter, perawat, bidan, tenaga paramedis lain, bahkan memberikan pelatihan kesehatan kepada kader posyandu dan dukun bersalin.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014

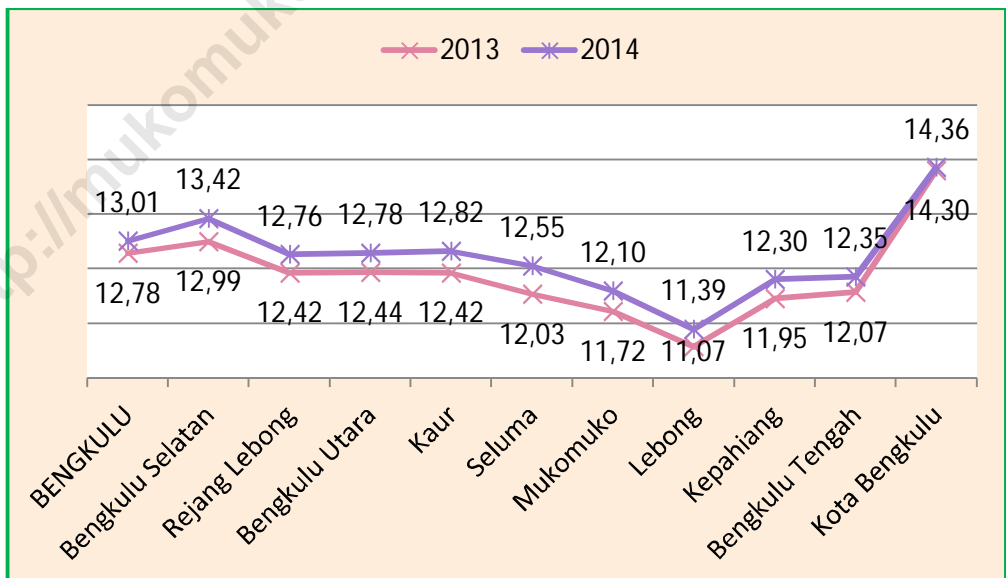
Selain itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah juga telah mengadakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah kematian bayi dan ibu akibat persalinan, yang pada akhirnya akan terlihat dari indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Secara umum, AHH di Provinsi Bengkulu tahun 2014 adalah 68,37 tahun, meningkat dibandingkan AHH tahun 2013 yang tercatat sebesar 68,33 tahun. Pada tahun 2014 AHH tertinggi adalah di Kota Bengkulu (69,46 tahun), sedangkan yang terendah di Kabupaten Lebong (62,01 tahun). Sementara Kabupaten Mukomuko mencatat pencapaian AHH sebesar 65,83 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu usaha lebih



pemerintah dalam peningkatan di bidang kesehatan agar mencapai angka 85 tahun.

### 4.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2014 sebesar 1,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil program pemerintah dalam rangka pendidikan. Dengan belum tercapainya target 18 tahun, hal ini menjadi pemicu pemerintah untuk terus meningkatkan angka melek huruf sehingga masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu akan memiliki harapan lamanya bersekolah lebih panjang. Jika dilihat per kabupaten, HLS tertinggi tahun 2014 adalah di Kota Bengkulu (14,36 tahun) dan terendah adalah Lebong (11,39 tahun). Sementara Mukomuko pencapaiannya adalah 12,10 tahun yang masih terbilang rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu perhatian ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.



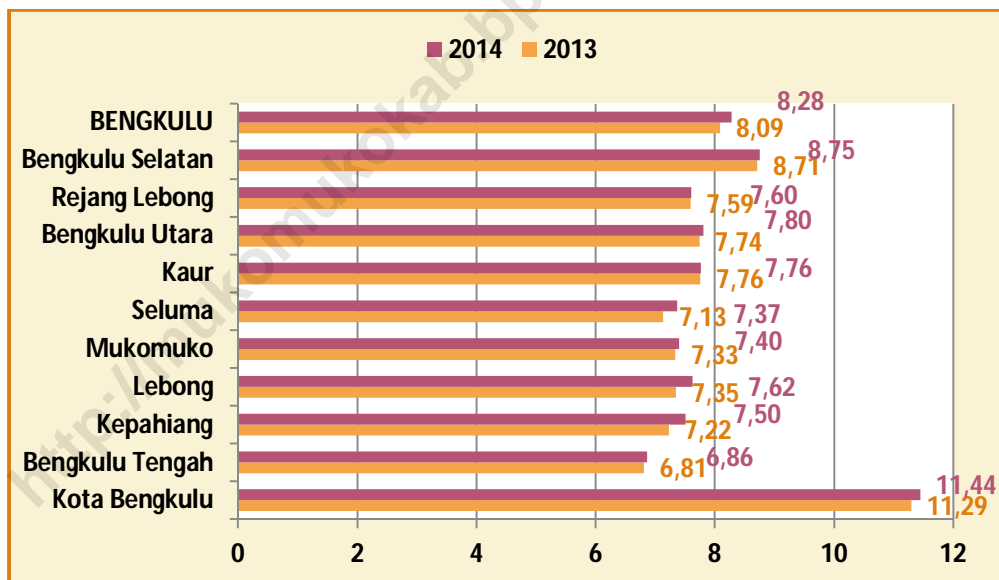
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-

2014

#### 4.4 Rata-rata Lama Sekolah

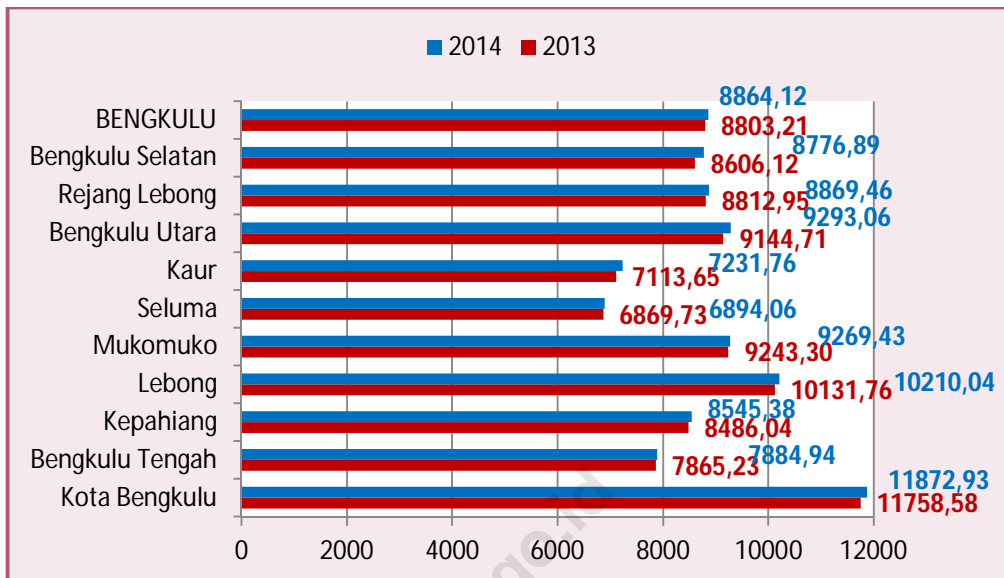
Rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 yaitu 7,4 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Mukomuko bersekolah formal selama 7,4 tahun atau setara kelas 1 SMP. Begitu pula dengan kabupaten lain yang juga rata-rata lama sekolahnya setara kelas 1 SMP pada tahun 2014 kecuali Bengkulu Selatan (setara kelas 2 SMP), Lebong (setara kelas 6 SD) dan Kota Bengkulu (setara kelas 2 SMA). Sementara untuk Provinsi Bengkulu sendiri setara dengan kelas 2 SMP. Hal ini menunjukkan bahwa Mukomuko masih di bawah angka Provinsi Bengkulu dan belum mencapai target UNDP untuk pendidikan formal selama 15 tahun atau setara kuliah semester 6. Hal ini menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.5 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014

#### 4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

Gambar 4.6 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2013-2014

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita riil disesuaikan di tiap kabupaten mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Nilai terbesar pada tahun 2014 adalah di Kota Bengkulu. Kemudian disusul oleh Kabupaten Lebong di urutan kedua, Bengkulu Utara di urutan ketiga, Mukomuko di urutan keempat, dan Rejang Lebong menempati urutan kelima. Tiga kabupaten/kota di atas merupakan kabupaten induk yang telah lama berdiri, tapi Mukomuko sebagai kabupaten baru/pecahan menempati posisi kelima. Hal itu mengindikasikan bahwa secara ekonomi, kabupaten Mukomuko sudah lebih baik dibanding kabupaten baru lainnya.



**KESIMPULAN**

**DAN**

**SARAN**

**5**

<http://mukomukok.com/bps/id>



## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Nilai IPM Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 adalah sebesar 65,31 yang artinya kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam kelompok sedang.
2. Nilai IPM Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 menempati peringkat kelima se-Provinsi Bengkulu sama seperti tahun sebelumnya (2010-2013) dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,8, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya (2013) yang artinya kenaikan pembangunan di bidang manusia tidak secepat tahun sebelumnya.
3. Pembangunan manusia di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2014 telah menunjukkan keberhasilan, yang ditunjukkan oleh angka IPM yang selalu meningkat setiap tahun, dari 62,95 pada tahun 2010 menjadi 65,31 pada tahun 2014.
4. Pencapaian IPM dibentuk dari komponen pendukungnya yang meliputi Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) 65,83 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,10 persen, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,40 tahun, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Rp 9.269.000.
5. Dengan nilai IPM sebesar 65,31 dan pertumbuhan IPM sebesar 0,80 pada tahun 2014 diperkirakan masih banyak waktu yang diperlukan untuk mencapai target IPM menjadi kategori sangat tinggi ( $\geq 80$ ).

### **5.2 Saran**

1. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup, yang merupakan determinasi dari penurunan Angka Kematian Bayi, Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu lebih meningkatkan program kesehatan ibu dan bayi, memperluas pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu khususnya untuk pelayanan persalinan, dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis.

2. Perlu penyadaran pentingnya pendidikan sehingga semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar, serta menyelenggarakan pendidikan yang berazas pemerataan dan keterjangkauan, dengan tetap mengacu kepada standar pendidikan nasional.
3. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan program yang perlu diprioritaskan, melalui penciptaan dan perluasan pasar bagi produk unggulan bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, juga merupakan upaya pengurangan angka kemiskinan.
4. Pada angka IPM ini, hendaknya difokuskan pada progress/pertumbuhannya dan tingkat kesenjangannya, bukan pada ranking antar daerah.
5. Perlu diingat bahwa alat ukur pembangunan manusia bukan hanya angka IPM. Konsep pembangunan manusia jauh lebih luas, termasuk demokrasi, keamanan, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, lingkungan terjaga, dan lain sebagainya.
6. Dari angka IPM dan nilai pada tiap-tiap komponen penyusunnya, perlu dilakukan analisa lebih dalam terhadap uraian pembangunan manusia.



# LAMPIRAN

6

<http://mukomukodipin.bps.go.id>



## 6. LAMPIRAN

**Tabel 1** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGGULU</b>	<b>65,35</b>	<b>65,96</b>	<b>66,61</b>	<b>67,50</b>	<b>68,06</b>
Bengkulu Selatan	65,84	66,50	66,77	67,61	68,28
Rejang Lebong	64,19	64,92	65,51	66,11	66,55
Bengkulu Utara	63,50	64,61	65,47	66,67	67,27
Kaur	61,39	61,85	62,32	63,17	63,75
Seluma	60,27	61,01	61,55	62,10	62,94
<b>Mukomuko</b>	<b>62,95</b>	<b>63,71</b>	<b>64,16</b>	<b>64,79</b>	<b>65,31</b>
Lebong	61,87	62,43	62,84	63,15	63,90
Kepahiang	62,60	63,44	63,86	64,44	65,22
Bengkulu Tengah	61,70	62,54	63,12	63,71	64,10
Kota Bengkulu	74,92	75,31	75,71	76,16	76,49

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

**Tabel 2. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Bengkulu Selatan	2	2	2	2	2
Rejang Lebong	3	3	3	4	4
Bengkulu Utara	4	4	4	3	3
Kaur	9	9	9	8	9
Seluma	10	10	10	10	10
<b>Mukomuko</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Lebong	7	8	8	9	8
Kepahiang	6	6	6	6	6
Bengkulu Tengah	8	7	7	7	7
Kota Bengkulu	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

**Tabel 3 Pertumbuhan IPM (Persen) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	-	<b>0,93</b>	<b>0,99</b>	<b>1,34</b>	<b>0,82</b>
Bengkulu Selatan	-	1,01	0,40	1,25	0,99
Rejang Lebong	-	1,13	0,91	0,91	0,67
Bengkulu Utara	-	1,74	1,34	1,83	0,89
Kaur	-	0,75	0,75	1,37	0,91
Seluma	-	1,23	0,88	0,89	1,35
<b>Mukomuko</b>	-	<b>1,21</b>	<b>0,71</b>	<b>0,98</b>	<b>0,80</b>
Lebong	-	0,91	0,66	0,49	1,19
Kepahiang	-	1,33	0,67	0,90	1,22
Bengkulu Tengah	-	1,36	0,93	0,94	0,61
Kota Bengkulu	-	0,52	0,52	0,60	0,43

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

**Tabel 4. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	<b>67,82</b>	<b>67,98</b>	<b>68,16</b>	<b>68,33</b>	<b>68,37</b>
Bengkulu Selatan	66,95	67,00	67,03	67,05	67,06
Rejang Lebong	67,20	67,28	67,34	67,39	67,42
Bengkulu Utara	67,28	67,32	67,35	67,37	67,38
Kaur	65,36	65,41	65,43	65,45	65,46
Seluma	66,31	66,35	66,38	66,39	66,40
<b>Mukomuko</b>	<b>65,57</b>	<b>65,66</b>	<b>65,74</b>	<b>65,80</b>	<b>65,83</b>
Lebong	61,95	62,00	62,01	62,01	62,01
Kepahiang	66,51	66,55	66,60	66,63	66,65
Bengkulu Tengah	67,57	67,60	67,61	67,61	67,61
Kota Bengkulu	69,31	69,36	69,40	69,44	69,46

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

**Tabel 5 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	<b>11,59</b>	<b>11,88</b>	<b>12,20</b>	<b>12,78</b>	<b>13,01</b>
Bengkulu Selatan	12,07	12,55	12,61	12,99	13,42
Rejang Lebong	11,46	11,76	12,09	12,42	12,76
Bengkulu Utara	10,91	11,45	11,98	12,44	12,78
Kaur	11,11	11,42	11,73	12,42	12,82
Seluma	10,59	11,20	11,62	12,03	12,55
<b>Mukomuko</b>	<b>10,66</b>	<b>11,15</b>	<b>11,36</b>	<b>11,72</b>	<b>12,10</b>
Lebong	10,76	10,86	10,96	11,07	11,39
Kepahiang	10,93	11,46	11,67	11,95	12,30
Bengkulu Tengah	10,95	11,51	11,79	12,07	12,35
Kota Bengkulu	14,12	14,16	14,21	14,30	14,36

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

**Tabel 6 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	<b>7,85</b>	<b>7,93</b>	<b>8,01</b>	<b>8,09</b>	<b>8,28</b>
Bengkulu Selatan	8,14	8,24	8,36	8,71	8,75
Rejang Lebong	7,38	7,54	7,57	7,59	7,60
Bengkulu Utara	6,83	7,13	7,27	7,74	7,80
Kaur	7,69	7,71	7,73	7,76	7,76
Seluma	7,06	7,09	7,11	7,13	7,37
<b>Mukomuko</b>	<b>6,93</b>	<b>7,06</b>	<b>7,19</b>	<b>7,33</b>	<b>7,40</b>
Lebong	7,35	7,35	7,35	7,35	7,62
Kepahiang	7,06	7,14	7,18	7,22	7,50
Bengkulu Tengah	6,36	6,48	6,65	6,81	6,86
Kota Bengkulu	10,92	11,04	11,17	11,29	11,44

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015



**Tabel 7 Pendapatan per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2010-2014**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>BENGKULU</b>	<b>8 459</b>	<b>8 572</b>	<b>8 682</b>	<b>8 803</b>	<b>8 864</b>
Bengkulu Selatan	8 486	8 526	8 566	8 606	8 777
Rejang Lebong	8 320	8 469	8 631	8 813	8 869
Bengkulu Utara	8 832	8 923	9 025	9 145	9 293
Kaur	6 883	6 947	7 022	7 114	7 232
Seluma	6 726	6 761	6 807	6 870	6 894
<b>Mukomuko</b>	<b>9 165</b>	<b>9 179</b>	<b>9 203</b>	<b>9 243</b>	<b>9 269</b>
Lebong	9 167	9 601	9 914	10 132	10 210
Kepahiang	8 082	8 197	8 307	8 486	8 545
Bengkulu Tengah	7 710	7 749	7 799	7 865	7 885
Kota Bengkulu	11 095	11 299	11 518	11 759	11 873

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015

<http://mukomukokab.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jl. Imam Bonjol Komplek Pemda Mukomuko  
Telp. 0737-71633 ; Fax 0737-71633  
Website: mukomukokab.bps.go.id  
Email: bps1706@bps.go.id

ISBN 602-6869-13-5



9 786026 869133